

## **PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE**

*Implementation of Government Accounting Standards in Realizing Transparency  
and Financial Accountability of Parepare Government*

**Andi Ayu Frihatni<sup>1)</sup>, Nirwana<sup>2)</sup>, Syamsuddin<sup>3)</sup>**

Email : [andiayufrihatni@iainpare.ac.id](mailto:andiayufrihatni@iainpare.ac.id) <sup>1)</sup>, [nirwana\\_ni@yahoo.com](mailto:nirwana_ni@yahoo.com) <sup>2)</sup>, [syam\\_wadi@yahoo.co.id](mailto:syam_wadi@yahoo.co.id) <sup>3)</sup>

Institute Agama Islam Negeri Kota Parepare<sup>1)2)</sup>, Universitas Hasanuddin Makassar <sup>3)</sup>

Kota Parepare <sup>1)2)</sup>, Makassar Sulawesi Selatan <sup>3)</sup>

### **Abstract**

*The preparation of financial statements is based on PP No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards as a report guide. The research aims to reveal financial transparency and accountability within the framework of government accounting standards. The type of research is qualitative with a case study approach at the Regional Finance Agency of Parepare, South Sulawesi. The research results related to the transparency of the Regional Finance Agency of Parepare found the publication of financial reports was carried out through print and electronic media that can be accessed by everyone. The published financial report includes disclosure of Parepare's financial and the realization of the budget that has been approved in the Regional Revenue and Expenditure Budget. On the other hand, In preparing its budget, the government of Parepare also involves the community through the Development Planning Conference, where the community can express their aspirations. Implementing accountability is also inseparable from performance standards, the success of performance in realizing public services is based on the indicators contained in the work plan which matches the budget and the work carried out by the government.*

*Keywords: Accountability; Financial statements; Government Accounting Standards; Transparency*

### **Abstrak**

Dalam penyusunan laporan keuangan didasarkan pada PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman laporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam kerangka kerja standar akuntansi pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam transparansi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, publikasi laporan keuangan dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik yang dapat diakses oleh semua orang. Pada laporan keuangan yang dipublikasi tersebut mencakup pengungkapan terhadap kondisi keuangan Parepare dan juga realisasi terhadap anggaran yang telah disahkan dalam APBD. Selain itu, dalam penyusunan anggarannya pemerintah Kota Parepare juga melibatkan masyarakat melalui Musrenbang dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya. Dalam menyelenggarakan akuntabilitas juga tidak lepas dari standar kinerja, dimana keberhasilan kinerja dalam merealisasikan pelayanan masyarakat didasarkan pada indikator-indikator yang termuat dalam rencana kerja yang tentunya sesuai antara anggaran dan kerja yang dilakukan oleh pemerintah

Kata kunci : Akuntabilitas; Laporan Keuangan; Standar Akuntansi Pemerintahan; Transparansi

## PENDAHULUAN

Pada era reformasi ini setiap daerah dituntut untuk melakukan segala urusan pemerintahan di daerahnya sendiri termasuk Pemerintah Kota Parepare, hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah memberikan tanggung jawab kepada daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan pelayanan masyarakat menjadi lebih baik, dan tentunya untuk pengembangan kehidupan masyarakat yang lebih demokratis. Dengan otonomi daerah setiap bagian dalam tata kelola daerah termasuk dalam hal keuangan sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah sehingga dibutuhkan transparansi dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas terhadap pengelolaan tersebut. Akuntabilitas sendiri merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap keberhasilan ataupun kegagalan pemerintah dalam tata kelola daerah termasuk dalam hal keuangan. Penerapan akuntansi yang baik adalah harus memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang tentunya setiap daerah harus berfokus pada standar ini. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat adanya transaksi yang dilakukan (Kurnia, 2015). Adapun standar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ramdani & Agustina, (2019) dalam penelitiannya menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual atas pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada SKPD kabupaten Aceh Utara. Dewi et al., (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung berita baik dan perusahaan yang mengalami berita baik akan cenderung menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu. Hal tersebut juga berbeda dalam penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi, (2015) yang mengatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran berbasis *value for money*. Akuntabilitas publik dan pengawasan sebagai variabel moderating berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran berbasis *value for money*, sedangkan transparansi sebagai variabel moderating tidak berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*.

Kusumah (2012) dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui penerapan SAP dan kualitas laporan SKPD kota Tasikmalaya. Adapun hasil penelitian yang didapatkan yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD/OPD di Pemerintahan kota Tasikmalaya. Hasil berbeda yang di kemukakan oleh Daniel Kartika Adhi & Suhardjo, (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas standar berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan serta dan penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak mampu memoderasi hubungan antara kualitas standar dengan laporan keuangan. Pada penelitian mutakhir. Ketidakpatuhan dengan peraturan mempengaruhi opini audit. Bangsawan & Abbas (2021) menemukan bahwa semakin banyak jumlah pelanggaran terhadap peraturan, semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah menerima opini audit wajar tanpa pengecualian. Menurutnya, keputusan ini didasari karena ketidakefektifan pemerintah dalam mengelola keuangan.

Melihat fenomena yang terjadi terkait akuntabilitas keuangan yaitu adanya temuan ketidaktaatan terhadap aturan perundang-undangan yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat bahkan negara. Hal tersebut terjadi karena adanya penyimpangan dana dan anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan (Ichlas et al., 2017). Selain itu persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa keuangan daerah sangat mudah dikorupsi oleh pemerintah daerah. Menurut mereka, segala anggaran yang dianggarkan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan atau sebuah proyek tidak hanya untuk membiayai proyek tersebut namun juga dipakai untuk kepentingan pribadi. Apalagi banyak kasus korupsi yang sedang marak terjadi di Indonesia, dimana mayoritas dilakukan oleh pejabat negara seperti contohnya kasus korupsi pada wisma atlet hambalang. Oleh karena itu, untuk mematahkan persepsi tersebut dibutuhkan akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, maka fokus penelitian ini diarahkan pada analisis terkait penerapan standar akuntansi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas suatu pelaporan yang masih dianggap belum maksimal di berbagai daerah khususnya Kota Parepare. Karena saat ini, masyarakat masih sedikit sulit dalam mengakses laporan keuangan secara utuh, dikarenakan ada informasi-informasi keuangan yang masih tidak

tersedia atau tidak lengkap yang dibutuhkan oleh pengguna sehingga menyebabkan kurang terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dengan baik. Pemerintah Kota Parepare telah menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban, namun untuk mengakses laporan keuangan secara utuh masih sedikit sulit, hal ini karena yang dipublikasi sebagai besar hanya berupa pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan yang dilakukan pemerintah sedangkan untuk laporan Neraca, Arus Kas dan lainnya masih sulit untuk diakses.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang berupa wawancara dimana data akan diambil secara langsung kepada narasumber. Wawancara menjadi alat dalam pengumpulan data yang nantinya akan digunakan dalam analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini. Narasumber yang akan diwawancarai yaitu pegawai di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari data sekunder yaitu data yang berasal dari sumber atau pengamatan lain. Contohnya: buku-buku literatur yang digunakan sebagai acuan, jurnal penelitian dan sebagainya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis data model Miles & Huberman (1984) yang meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan mampu menciptakan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Bangsawan & Abbas, 2021). Penyusunan laporan keuangan harus didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman menyusun laporan keuangan agar laporan yang dihasilkan seragam antara daerah yang satu dengan laporan keuangan daerah lain. Selain itu, dengan adanya standar ini juga memudahkan BPK untuk mengaudit dan memahami laporan keuangan. Oleh karena itu, setiap pencatatan yang dilakukan oleh setiap daerah harus didasarkan pada SAP. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Muchdy dalam wawancara penelitian, sebagai berikut:<sup>1</sup>

“Kami dalam penyusunan laporan keuangan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Alhamdulillah penerapan SAP sudah berjalan dengan baik”

Berdasarkan wawancara yang di atas Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang dimaksud meliputi:

- a) PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan
- b) PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran
- c) PSAP No. 03 Laporan Arus Kas
- d) PSAP No. 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
- e) PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan
- f) PSAP No. 06 Akuntansi Investasi
- g) PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap
- h) PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
- i) PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban
- j) PSAP No. 10 Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
- k) PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
- l) PSAP No. 12 Laporan Operasional

Badan Keuangan Daerah dalam penerapan SAP juga harus terus melakukan update terhadap perubahan-perubahan aturan terbaru sehingga tetap memastikan SAP berjalan sebagai mana

---

<sup>1</sup> Muchdy, Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Oktober 2021.

mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya perubahan tentunya membutuhkan penyesuaian kembali. Adapun hal ini dijelaskan oleh Bapak Muchdy, sebagai berikut:<sup>2</sup>

“Setiap ada perubahan aturan berarti ada perubahan atau penambahan nomenklatur, jadi setiap terjadi perubahan kami akan mengadakan sosialisasi kepada operator dan pengelola akuntansi di setiap SKPD”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa BKD Parepare melakukan sosialisasi kepada bagian akuntansi setiap SKPD saat terjadi perubahan-perubahan SAP sehingga sumber daya manusia pada bagian akuntansi harus paham mengenai akuntansi. Sumber daya manusia dibidang akuntansi dan pelaporan pada Badan Keuangan Daerah harus memiliki kemampuan dasar dalam bidang akuntansi atau ekonomi agar lebih memudahkan dalam pelaksanaan dan penerapan SAP tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Muchdy, sebagai berikut:<sup>3</sup>

“Khusus untuk bidang akuntansi dan pelaporan itu 95% SDMnya memiliki *basic* di bidang akuntansi, manajemen, atau ekonomi. Dengan adanya *basic* itu lebih memudahkan mereka dalam memahami penerapan akuntansi khususnya Standar Akuntansi Pemerintahan.”

Dasar akuntansi yang kuat yang dimiliki setiap staf akan sangat mengoptimalkan penerapan SAP namun tentunya harus dibutuhkan sarana yang lebih memadai agar dapat menunjang terciptanya laporan keuangan yang lebih baik lagi. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Agussalim sebagai berikut:<sup>4</sup>

“Sarana dalam penerapan SAP alhamdulillah sudah memadai, jadi dalam penerapan SAP itu kami memakai sebuah aplikasi, jadi kami dalam melakukan rekonsiliasi itu melihat di aplikasi itu. Untuk tahun 2021 sudah ada aplikasi baru tapi namun belum optimal jadi kita pake aplikasi sebelumnya sesuai dengan edaran menteri dalam negeri.”

Berdasarkan wawancara di atas dalam penyusunan laporan keuangan BKD Parepare menggunakan aplikasi yang dapat merekonsiliasi semua pendapatan, pengeluaran yang dilakukan oleh setiap SKPD. Tentunya dengan aplikasi yang berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat lebih memudahkan penyusunan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penyusunan laporan keuangan tentunya banyak kendala yang dihadapi, adapun kendala yang dihadapi Badan Keuangan Daerah dalam penerapan SAP dijelaskan oleh Bapak Muchdy, sebagai berikut:<sup>5</sup>

“Kendala yang kami hadapi dalam penerapan SAP, paling kalau ada rolling SDM. Karena biasanya ada orang sudah menguasai satu bidang terus dirolling ke tempat yang baru dan ada orang baru yang mengganti, tentunya harus belajar dan bersosialisasi lagi”

Berdasarkan wawancara di atas setiap terjadi rolling SDM akan dibimbing lagi agar dapat memahami tugas yang akan dilakukan tentunya dengan menjelaskan isi pernyataan-pernyataan SAP agar tidak salah dalam penyusunan laporan keuangan.

---

<sup>2</sup> Muchdy, Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Oktober 2021.

<sup>3</sup> Muchdy, Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Oktober 2021.

<sup>4</sup> Agussalim, Sekretaris Badan Keuangan Daerah, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Oktober 2021.

<sup>5</sup> Muchdy, Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Oktober 2021.

## Transparansi

Untuk mencapai transparansi, organisasi harus memberikan informasi terkait kegiatan dan tata kelola kepada para pemangku kepentingan yang akurat, lengkap dan tersedia secara tepat waktu. Ini tidak berarti semua informasi harus tersedia untuk umum. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan indikator transparansi yaitu informatif, pengungkapan dan keterbukaan, sebagai berikut:

### a) *Informatif*

Penyelenggaraan transparansi pemerintah dituntut untuk memberikan informasi kepada stakeholder atau pihak yang membutuhkan baik berupa data, prosedur, fakta ataupun sebagainya. Termasuk informasi dalam hal keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Muchdy sebagai berikut:

“Dalam hal transparansi pastinya diwajibkan untuk seluruh pemerintah daerah maupun kota untuk mempublikasikan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi kami kepada masyarakat, kami menyediakan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan seperti Laporan Realisasi Anggaran, lainnya.”

Berdasarkan wawancara di atas BKD kota Parepare telah melakukan pembulisan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban mereka dalam penerapan akuntabilitas. Pemublikasian laporan keuangan kota Parepare, Badan Keuangan Daerah menggunakan media cetak dan media elektronik. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Hamka, sebagai berikut:

“Sebenarnya dalam publikasi laporan keuangan, kami publikasikan hard filenya kepada media cetak maupun media elektronik kemudian mereka yang menarasikan berapa pendapatan kota Parepare, berapa besar belanja yang dilakukan kota Parepare. Karena soft file dalam pencatatan kami menggunakan sistem dan hanya bisa diakses oleh orang yang memang punya akses terhadap sistem tersebut.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Muchdy, sebagai berikut:

“Ada kami publikasikan laporan keuangan biasanya di ParePos biasanya akhir tahun setelah laporan pertanggungjawaban itu sudah menjadi PERDA tetapi kalau masih mentah belum dipublikasikan. Selain itu, kami juga mempublikasikan di website kominfo, ada khusus untuk BKD disitu informasi-informasi keuangan.”

Berdasarkan wawancara di atas informasi keuangan yang dipublikasikan bisa didapatkan setiap waktu karena tersedia di website kominfo dan juga dipublikasi di media cetak. Seperti yang dijelaskan Bapak Muchdy sebelumnya publikasi laporan keuangan yang dilakukan oleh BKD tergantung apakah laporan tersebut sudah menjadi PERDA atau belum sehingga hal inilah yang kadang menjadi faktor yang menghambat ketepatan waktu dari publikasi laporan keuangan.

### b) *Pengungkapan*

Pelaksanaan transparansi pengungkapan dilakukan kepada masyarakat mengenai keadaan-keadaan kinerja finansial yang dilakukan oleh setiap daerah. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Muchdy dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Masalah pengungkapan saya rasa kami sudah menjalankan dengan baik, kami sudah ungkapkan seluruh kinerja finansial dalam laporan pertanggungjawaban, seperti alokasi-alokasi anggaran, realisasi dan sisa pagu berapa persentasenya”

Berdasarkan wawancara di atas dalam penerapan transparansi kinerja finansial diungkapkan pada laporan keuangan yang dipublikasi mulai dari anggaran, aset, utang dan lain sebagainya. Laporan keuangan yang dihasilkan berbasis akrual kecuali laporan realisasi anggaran masih berbasis kas, hal ini sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. Berikut penjelasan Bapak Muchdy terhadap pengelolaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BKD, sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan laporan keuangan kami menggunakan sistem dalam hal pencatatan kami menggunakan basis akrual, dan khusus untuk laporan realisasi anggaran kami masih menggunakan basis kas. Namun, untuk laporan keuangan secara utuh kami tetap menggunakan basis akrual”

Berdasarkan wawancara di atas laporan keuangan yang dihasilkan berbasis akrual dan kas. Laporan keuangan secara umum berbasis akrual yang artinya pencatatannya dilakukan saat transaksi terjadi walaupun kasnya belum diterima sedangkan pada laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas yang artinya transaksi hanya dicatat jika terjadi penerimaan dan pengeluaran kas. Berbicara dalam hal pengungkapan kondisi keuangan sebagai bentuk transparansi pemerintah daerah dijelaskan oleh Bapak Agusssalim, sebagai berikut:

“Kondisi keuangan untuk saat ini masih sehat, likuiditasnya masih bagus dalam artian kami masih bisa membayar biaya operasional termasuk utang-utang, kami juga masih surplus dan masih bisa membiayai semua kegiatan dianggarkan APBD yang telah ditetapkan”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Muchdy sebagai berikut:

“Alhamdulillah kondisi keuangan kita saat ini masih normal dan bisa dikatakan sehat, bisa dilihat di laporan realisasi anggaran juga”

c) *Keterbukaan*

Penyelenggaraan transparansi tentu keterbukaan merupakan salah satu kunci penting. Hal ini berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi itu sendiri, proses penyampaian dan pengawasan dalam akuntabilitas laporan keuangan. Seperti wawancara yang dilakukan dengan Ibu Indra Karya dalam menjelaskan peran aktif masyarakat dalam proses penyusunan anggaran sebagai berikut:

“Nah cara masyarakat ikut berperan aktif dalam proses penyusunan anggaran itu ada yang namanya musyawara perencanaan pembangunan (musrenbang) melalui kelurahan. Jadi masyarakat diundang untuk menyampaikan aspirasinya apa yang mereka butuhkan, kemudian hasil musrenbang itu akan diverifikasi lagi mana yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah akan dimuat dalam RKPD yang selanjutnya akan dianggarkan. Selain itu juga biasa diadakan reses melalui anggota DPRD.”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui jika masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, dimana anggaran ini diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat mulai dari pembangunan jalan, anggaran kesehatan, sekolah dan lain sebagainya. Hal ini berarti dalam penerapan transparansi dalam hal ini keterbukaan yang melibatkan masyarakat telah dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Kota Parepare. Berbicara mengenai kepentingan masyarakat tentunya hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah khususnya dalam pemberian fasilitas umum. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Indra Karya sebagai berikut:

“Kalau berbicara mengenai kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat itu, kita analogikan saja dengan janji politik. Janji politik itu kan semuanya keinginan masyarakat jadi selama janji politik itu diterapkan dan realisasikan oleh pemerintah daerah artinya sudah disesuaikan dengan kebutuhannya masyarakat. Sebagai contoh pelayanan kesehatan bisa dilihat semua masyarakat kecil sudah hampir merasakan pelayanan kesehatan, ada call center juga itu semuanya termuat dalam anggaran.”

Berdasarkan wawancara di atas dan dilihat realisasinya tentu pemerintah kota parepare telah melakukan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat. Saat ini sudah ada layanan kesehatan call center yang bisa dinikmati masyarakat yang diberikan oleh pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakat Parepare.

Keterbukaan selain dalam hal pelayanan juga harus diterapkan dalam pelaporan keuangan. Keterbukaan pada laporan keuangan tidak serta merta dilakukan begitu saja namun tentunya dilakukan pengawasan dan monitoring agar berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Dalam penganggaran untuk kepentingan masyarakat tentunya dikelola oleh berbagai SKPD terkait sehingga dalam penyusunan laporan keuangannya harus digabungkan

dari setiap SKPD yang terkait. Adapun hal ini dijelaskan oleh Bapak Agussalim sebagai berikut:

“Pengawasan dan monitoringnya dilaksanakan rekonsiliasi setiap bulan dari 33 SKPD, rekonsiliasi itu mencocokkan semua angka-angka baik dalam pendapatannya maupun belanja setiap bulan. Kalau ada selisih akan dikoreksi dan diperbaiki.”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa setiap pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh setiap SKPD akan dicocokkan angkanya sehingga tidak terjadi salah saji dalam penyusunan laporan keuangan di akhir tahun dalam periode akuntansi.

Berdasarkan wawancara secara keseluruhan dalam penyelenggaraan transparansi pemerintah daerah sudah menerapkan hal ini dengan baik, dimulai dari melibatkan masyarakat dalam penyusunan anggaran, menyediakan informasi keuangan yang lengkap untuk masyarakat, hingga mempublikasikan laporan keuangan kepada media cetak maupun media elektronik yang akan dimuat dalam berita seperti ParePos.

## **Akuntabilitas**

Akuntabilitas sangat penting dalam pemerintahan. Tanpa adanya pemeriksaan, keseimbangan, dan konsekuensi untuk kesalahan, integritas pemerintah dalam hal pelaporan keuangan tidak akan dapat dipertahankan (Mardiasmo, 2004). Untuk mengukur kinerja dalam proses akuntabilitas dibutuhkan informasi keuangan dan informasi non keuangan sebagai berikut:

### *a) Informasi Keuangan*

Informasi keuangan diukur melalui rencana kerja yang telah disusun dan dianggarkan. Anggaran yang telah dibuat dibandingkan dengan realisasi anggaran tersebut dan juga dalam pengelolaan anggaran apakah efektif, efisien dan ekonomis atau tidak. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu Indra Karyana, sebagai berikut:<sup>6</sup>

“Dalam mengukur keberhasilan kinerja efektif, efisien dan ekonomis dalam pengelolaannya bisa dilihat pada program dan kegiatan yang sudah disusun, didalamnya ada indikator-indikator yang harus dilakukan. Hal ini dibuat dalam rencana kerja yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja.”

Berdasarkan wawancara di atas indikator-indikator yang telah disusun harus dilakukan yang nantinya akan menghasilkan tingkat keberhasilan kinerja apakah program yang dilakukan tersebut sudah efektif, efisien dan ekonomis. Selanjutnya, untuk melihat apakah keberhasilan kinerja suatu program yang termuat sudah optimal atau tidak dilihat nilai fisik harus lebih besar daripada keuangan. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Andi Darawati selaku Kasubag Evaluasi dan Pelaporan BKD, sebagai berikut:<sup>7</sup>

“Untuk menilai keberhasilan kinerja kita lihat fisik dan keuangan dari sebuah program. Disini harus lebih besar fisik daripada keuangan karena ini memandakan lebih banyak kerja dibandingkan keluarnya uang, kalau kondisinya seperti ini bisa dikatakan sudah berhasil dalam kinerjanya. Kalau keuangan lebih besar dibandingkan fisik berarti lebih banyak uang yang dikeluarkan daripada kerja yang dilakukan, tentunya ini menjadi kegagalan dalam kinerja. Sebagai contoh tahun 2020 total persentase fisik program yang kami capai itu 98,71% sedangkan persentase keuangannya 89,08% ini berarti dalam pada tahun 2020 kami sudah bagus dalam hal kinerja.”

Selanjutnya target anggaran yang telah dianggarkan untuk membiayai suatu program sesuai dengan APBD juga merupakan tolak ukur dalam keberhasilan kinerja. Dengan ini dapat

---

<sup>6</sup> Indra Karyana, Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Oktober 2021.

<sup>7</sup> Andi Darawati, Kepala Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Oktober 2021.

dilihat cara SDM mengelola keuangan dalam pembiayaan program, Sejalan dengan yang dikemukakan Ibu Indra Karyana sebagai berikut:<sup>8</sup>

“Ini bisa dilihat jika yang termuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan target rencana kerja maka sudah dikatakan berhasil”

Berdasarkan wawancara di atas rencana kerja yang telah dilakukan yang sesuai dengan pelaksanaan akan sudah dikatakan berhasil, dimana dalam realisasi anggaran dikatakan optimal jika mencapai 100%. Berbicara mengenai optimal tidaknya suatu anggaran jika anggaran dan realisasinya mencapai 100% berarti dalam hal ini dana yang dianggarkan habis terpakai. Sehingga pada dasarnya kosongnya kas pemerintah pada periode akuntansi menunjukkan keberhasilan kinerja. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Agussalim sebagai berikut:<sup>9</sup>

“Kalau kekosongan kas sebenarnya bagus juga berarti antara anggaran dan realisasinya itu optimal. Namun kalau kas mengalami kekosongan berarti ada yang tidak normal karena ini akan menjadi fatal. Oleh karena itu setiap tahun pasti ada SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Tidak mungkin dalam penganggaran habis untuk dibelanjakan mungkin ada kegiatan yang tidak selesai sehingga dananya disaving untuk dibelanjakan tahun berikutnya pada kegiatan yang sama. Contohnya pengguna SILPA ini utang saat ada kontrak tapi belum dibayarkan maka akan dibayarkan menggunakan SILPA untung tahun depan.”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa tidak mungkin anggaran tersebut habis dibelanjakan. Tetapi dana yang tidak habis tersebut akan disaving untuk membiayai program yang sedang berjalan pada tahun berikutnya karena pada laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas dimana pencatatan terjadi jika ada pengeluaran ataupun pendapatan saja.

#### b) Informasi Non Keuangan

Informasi non keuangan mencakup pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah guna untuk memperbaiki akuntabilitas. Adapun dalam penelitian ini Badan Keuangan Daerah dalam memberikan pelayanan berkaitan dengan pajak dan retribusi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Rahmat, sebagai berikut:<sup>10</sup>

“Pelayanan yang kami siapkan di Badan Keuangan Daerah sebagai contoh pajak bumi dan bangunan pastinya pelayanan pembayaran, kalau sifatnya administratif biasanya ada pelayanan mutasi bisa berupa balik nama, pemecahan, mutasi balik nama subjek pajak satu menjadi orang lain. Ada juga yang namanya pelayanan pembetulan terhadap data yang tidak sesuai di SPPT, pendaftaran objek pajak baru, penyediaan salinan SPPT, ada layanan keberatan oleh wajib pajak terhadap kekeliruan atau kesalahan hitung, ada pengurangan pajak dan semua perpajakan.”

Berdasarkan wawancara di atas, BKD memberikan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi, yang tentunya dalam pelayanan publik ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai bentuk kewajiban dalam pemenuhan hak-haknya. Hal inilah yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan pemerintah dalam menyusun prosedur-prosedur agar tidak terlalu sulit bagi masyarakat untuk memenuhi prosedur tersebut dan apabila terjadi kendala tentunya lebih mudah untuk diatasi. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bapak Rahmat, sebagai berikut:<sup>11</sup>

“Kami dalam membangun kerangka-kerangka SOP itu pastinya pertimbangannya pro rakyat dan memberikan kemudahan esensinya kami memberikan pelayanan seefektif mungkin dalam arti jangan karena satu prosedur memberatkan masyarakat. Namun, tidak

---

<sup>8</sup> Indra Karyana, Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Oktober 2021.

<sup>9</sup> Agussalim, Sekretaris Badan Keuangan Daerah, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Oktober 2021

<sup>10</sup> Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Oktober 2021.

<sup>11</sup> Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Oktober 2021.

mengabaikan juga unsur tertib administrasi artinya persyaratan administrasi itu mutlak karena ini menjadi pedoman bahwa kita menggunakan standar yang sama bagi semua masyarakat, kalau tidak ada persyaratan administrasi bisa saja ada pihak yang bersifat subjektif dalam memberikan pelayanan seperti karena kenal jadi dimudahkan dalam kepengurusannya. Kalau ada kendala yang dihadapi masyarakat kami akan arahkan apa yang harus mereka lakukan.”

Badan Keuangan Daerah dalam memberikan pelayanan mencari cara agar memudahkan masyarakat dalam memenuhi prosedur khususnya dalam pembayaran pajak dan distribusi. Di era digital ini pemerintah tentunya harus mengikuti perkembangan jaman, dengan mulai melakukan pembayaran pajak secara online agar lebih memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kapanpun dan dimanapun. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Rahmat sebagai berikut:<sup>12</sup>

“Untuk sekarang kami sementara mendvelop aplikasinya, insyaallah tahun ini ada 9 mata pajak yang kamu prioritaskan sudah bisa nantinya memfasilitasi kemudahan-kemudahan pembayaran dengan kanal-kanal pembayaran seperti ovo, dana, alfamart dan lainnya sudah kami rencanakan. Tapi sekarang pembayaran pajak bisa dilakukan dengan transaksi non tunai dengan langsung membayarkan ke rekening kas daerah.”

Penyelenggaraan akuntabilitas tentunya dibutuhkan keterbukaan dalam proses pemberian layanan publik bukan hanya masalah keuangan saja. Untuk melaksanakan hal ini tentunya dengan memberikan tugas sesuai dengan *job description* masing-masing agar lebih memudahkan dalam pemberian pelayanannya. Selain itu juga dalam memberikan pelayanan harus bersifat objektif. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Rahmat, sebagai berikut:<sup>13</sup>

“Jadi kami disini pastinya untuk pejabat non eselon memang ada dasar-dasar penempatannya berdasarkan keputusan walikota tapi pastinya dalam SK kami sebagai PNS ada namanya tugas lainnya yang berikan pimpinan jadi bisa saja diberikan tugas di tempat lain. Namun, kami juga punya kebijakan-kebijakan dengan kita melakukan rotasi. Rotasi itu penguatannya ada semacam penetapan kepala badan dalam bentuk surat tugas. Hal ini kami lakukan untuk menghindari komunikasi-komunikasi yang mencurigakan misalnya satu pengelola pajak berada di posisi yang sama terlalu lama sehingga terlalu akrab dengan beberapa orang masyarakat sehingga terjadi sikap subjektif dalam pemberian pelayanan. Inilah sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam memberikan pelayanan.”

Berdasarkan wawancara di atas, BKD dalam mempertanggungjawabkan pelayanan yang berikan kepada masyarakat dengan melakukan rotasi SDM agar dalam pelayanan tidak bersifat subjektif dengan membedakan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain.

## SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Pengelolaan keuangan parepare dilakukan mulai dari tahap perencanaan penganggaran yang memuat rencana kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang akan dibiayai selama tahun anggaran tersebut yang kemudian akan disahkan dalam APBD. Selanjutnya tahap pelaksanaan APBD dalam hal ini proyek yang telah disahkan dalam APBD akan direalisasinya. Dalam pelaksanaan APBD, transaksi-transaksi yang dilakukan dalam pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan akan dicatat dalam laporan keuangan, ini merupakan tahap pencatatan. Tahap terakhir yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh BKD.

Pencapaian keuangan yang didapatkan oleh Kota Parepare pada tahun 2017-2019. Berdasarkan opini BPK terhadap laporan keuangan yaitu pada tahun 2017 dan 2019 Parepare mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian sedangkan pada tahun 2018 Parepare mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Dalam laporan realisasi anggaran keberhasilan

---

<sup>12</sup> Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Oktober 2021.

<sup>13</sup> Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Oktober 2021.

Parepare dalam merealisasikan anggaran pendapatan pada tahun 2017 sebesar 83,89%, belanja sebesar 85,43% dan parepare mengalami defisit sebesar 108,26%. Pada tahun 2018 realisasi anggaran pendapatan parepare sebesar 94.54%, belanja 91,43% dan parepare mengalami surplus sebesar 466,13%. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan sebesar 95.21%, belanja sebesar 89,65% dan surplus sebesar 290,93%. Dalam penyusunan laporan keuangan didasarkan pada PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman pencatatan. Dalam transparansi Badan Keuangan Daerah melakukan publikasi laporan keuangan melalui media cetak maupun media elektronik yang dapat diakses oleh semua orang. Pada laporan keuangan yang dipublikasi tersebut mencakup pengungkapan terhadap kondisi keuangan Parepare dan juga realisasi terhadap anggaran yang telah disahkan dalam APBD. Selain itu, dalam penyusunan anggarannya pemerintah Kota Parepare juga melibatkan masyarakat melalui Musrenbang dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya. Dalam menyelenggarakan akuntabilitas juga tidak lepas dari standar kinerja, dimana keberhasilan kinerja dalam merealisasikan pelayanan masyarakat didasarkan pada indikator-indikator yang termuat dalam rencana kerja yang tentunya disesuaikan antara anggaran dan kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan yang diberikan badan keuangan daerah sebagai koordinator pendapatan asli daerah yaitu dalam pemungutan pajak daerah yang dikelola 100% sedangkan retribusi daerah sebagian dikelola oleh SKPD-SKPD yang sesuai dengan pencatatan diunit kerjanya masing-masing. Dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah BKD melakukan pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka kerjakan melalui laporan keuangan yang penyusunannya dilakukan dengan jujur, adil, sesuai dengan bukti transaksi yang ada.

## B. Saran

Adapun saran untuk Badan Keuangan Daerah Kota Parepare adalah dengan melihat banyaknya persepsi masyarakat umum yang mempertanyakan akuntabilitas ini ada baiknya jika pemerintah sesekali melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai akuntabilitas keuangan daerah agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bangsawan, A.A., & Abbas, A. (2021). Efek Pelanggaran Standar Akuntansi Pemerintahan dan Ketidakpatuhan Peraturan terhadap Opini Audit Laporan Keuangan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. 21(2), 461-472.
- Daniel Kartika Adhi, & Suhardjo, Y. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Dewi, I. G. A. R. P., Yadnyana, I. K., & Sudana, I. P. (2016). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatanwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan Dan Implikasinya Pada Earning Response Coefficient. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(9), 3031–3056. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/20181/16162>
- Ichlas, M., Dr. Hasan Basri. M.Com, A., & Dr. Muhammad Arfan. SE, M.Si, Ak, C. (2017). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi : Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(4), 76–84.
- Khotami, M. (2017). *The Concept Of Accountability In Good Governance*. 163(Icodag), 30–33. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.6>
- Kurnia, L. M. R. dan P. (2015). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)*. 2(2), 1–15.

- Kusumah, Ardi Arif. (2012). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya). *Jurnal Akuntansi, 2012 - Educipta.Com*, 1–10
- Pertiwi, D. P. (2015). The Influence of Accountability, Transparency, and Control to Budgeting Management of The Value for Money Concept of Government Institute (SKPD) in Riau Province. *Jom FEKON, 2(2)*, 1–15.
- Ramdani, E., & Agustina, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan, 5*, 1–10.
- Saremi, H., & Mohammadi, S. (2015). The Relationship between Transparency and Accountability in Public Accounting. *Research Of Finance and Accounting, 6(9)*, 189–192.
- Sholohah, S. A., & Sulistyawati, A. I. (2018). Fokus Ekonomi. *Jurnal Fokus Ekonomi, 13(2)*, 280–300.